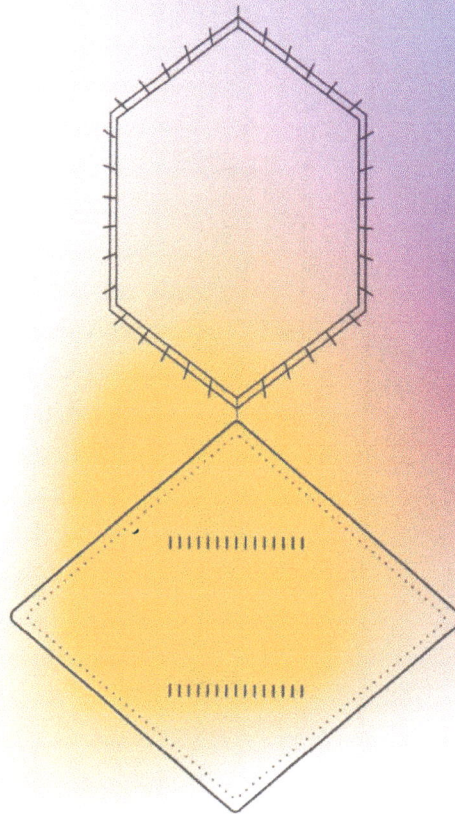




**LAPORAN MONEV 3 UNSUR TERENDAH DALAM PELAKSANAAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN KEEMPAT PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER 2025**

**PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**



I. Pendahuluan

1. Dasar Monitoring

Berdasarkan Publikasi Indeks Kepuasan Masyarakat periode Oktober s/d Desember 2025 terdapat 3 unsur terendah dengan nilai per unsur :

1. Pendapat pengguna layanan tentang kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan dengan nilai 120.
2. Pemahaman pengguna layanan tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan dengan nilai 120.
3. Pendapat pengguna layanan tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan dengan nilai 120.

2. Tujuan Monitoring

Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.

3. Pelaksanaan Monitoring

Monitoring diawali dengan penelitian hasil publikasi indeks kepuasan masyarakat periode bulan Oktober s/d bulan Desember 2025 untuk fokus terhadap evaluasi yang akan dilaksanakan.

II. Uraian Hasil Monitoring

Dari monitoring yang dilakukan terhadap 3 unsur terendah diperoleh data sebagai berikut :

1. Pemahaman pengguna layanan tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanan pada Pengadilan.
 - Bahwa pembaruan informasi pada alat bantu seperti checklist untuk menjelaskan persyaratan kepada pengguna layanan tentang persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya.
 - Bahwa petugas layanan kurang cakap dalam memberikan informasi tentang persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya.
2. Pemahaman pengguna layanan tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan.
 - Bahwa masih kurangnya kompetensi/kemampuan petugas terhadap prosedur pelayanan pada Pengadilan.
 - Bahwa masih kurangnya petugas layanan memberikan informasi tentang persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya dalam mempermudah pengguna layanan.
3. Pemahaman pengguna layanan tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan.

- Bahwa petugas layanan masih belum menguasai secara maksimal waktu pelayanan di PTSP.

III. Evaluasi

Setelah dilakukan monitoring terhadap 3 unsur terendah maka dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut :


1. Sudah dilakukan pengarahan dan pembinaan agar setiap petugas PTSP dapat memberikan layanan sesuai dengan jenis layanan yang di minta masyarakat.
 - Memperbarui persyaratan seperti checklist agar layanan persyaratan yang diminta pada pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
 - Memahami dan menyampaikan secara sederhana kepada pengguna layanan.
2. Sudah dilakukan pengarahan dan pembinaan agar setiap petugas PTSP memberikan kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan.
 - Petugas pelayanan untuk memahami SOP layanannya.
 - Memberikan pelatihan/pengarahan kepada petugas dalam memberikan pelayanan melalui briefing.
3. Sudah dilakukan pengarahan dan pembinaan agar setiap petugas SOP harus memperhatikan SOP kecepatan waktu saat pemberian pelayanan kepada masyarakat.
 - Meningkatkan pelayanan dengan menerapkan prioritas pelayanan
 - Pelatihan, briefing, rapat, supervise internal bagi petugas layanan untuk meningkatkan waktu pelayanan.

IV. Penutup

Demikian Monitoring dan Evaluasi terhadap 3 Hasil Terendah Publikasi Indeks Kepuasan Masyarakat periode bulan Oktober 2025 sampai Desember 2025.

Mengetahui:

Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao



Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Ba'a, 6 Januari 2026

Panitera

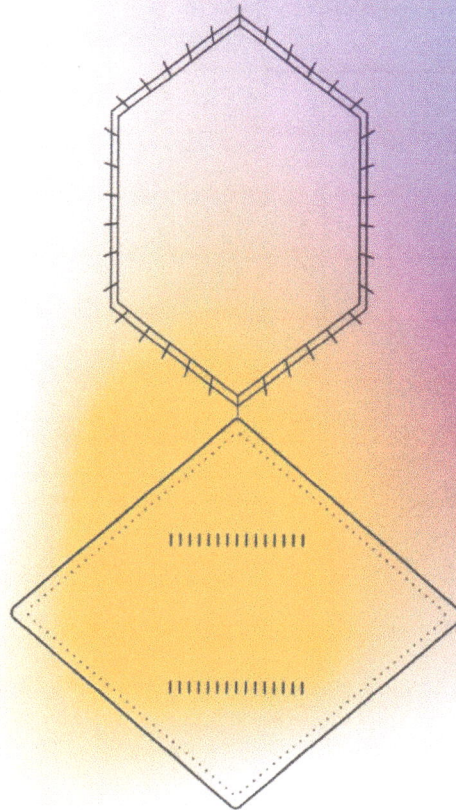


Alfonsus Hoinbala, S.H.



**LAPORAN MONEV 3 UNSUR TERENDAH DALAM PELAKSANAAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN KEEMPAT PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER 2025**

**PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**



I. Pendahuluan

1. Dasar Monitoring

Berdasarkan Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi periode Oktober s/d Desember 2025 terdapat 3 unsur terendah dengan nilai per unsur :

1. Pendapat pengguna layanan tentang kesesuaian prosedur dan ketentuan yang berlaku pada Pengadilan dengan nilai 120.
2. Pemahaman pengguna layanan tentang penyalahgunaan jabatan oleh petugas untuk imbalan tertentu pada Pengadilan dengan nilai 120.
3. Pendapat pengguna layanan tentang pencaloan pegawai Pengadilan dalam membantu pengurusan layanan dengan nilai 120.

2. Tujuan Monitoring

Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.

3. Pelaksanaan Monitoring

Monitoring diawali dengan penelitian hasil publikasi indeks kepuasan masyarakat periode bulan Oktober s/d bulan Desember 2025 untuk fokus terhadap evaluasi yang akan dilaksanakan.

II. Uraian Hasil Monitoring

Dari monitoring yang dilakukan terhadap 3 unsur terendah diperoleh data sebagai berikut :

1. Pemahaman pengguna layanan tentang kesesuaian prosedur dan ketentuan yang berlaku pada Pengadilan
 - Bahwa masih kurangnya kompetensi/kemampuan petugas terhadap prosedur pelayanan pada Pengadilan.
 - Bahwa masih kurangnya petugas layanan memberikan informasi tentang persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya dalam mempermudah pengguna layanan.
2. Pemahaman pengguna layanan tentang penyalahgunaan jabatan oleh petugas untuk imbalan tertentu pada Pengadilan.
 - Bahwa para petugas tidak terpengaruh dengan bujukan beberapa pengguna layanan dan tetap patuh pada prosedur pelayanan.
3. Pemahaman pengguna layanan tentang pencaloan pegawai Pengadilan dalam membantu pengurusan layanan
 - Bahwa petugas layanan selalu menaati prosedur dan melakukan pelayanan dengan SOP yang sudah ada.

III. Evaluasi

Setelah dilakukan monitoring terhadap 3 unsur terendah maka dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut :

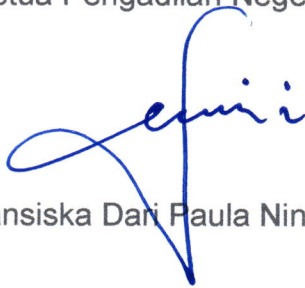
1. Sudah dilakukan pengarahan dan pembinaan agar setiap petugas PTSP dapat memberikan layanan sesuai dengan jenis layanan yang di minta masyarakat :
 - Memperbarui persyaratan seperti checklist agar layanan persyaratan yang diminta pada pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
 - Memahami dan menyampaikan secara sederhana kepada pengguna layanan.
 - Petugas pelayanan untuk memahami SOP layanannya.
 - Memberikan pelatihan/pengarahan kepada petugas dalam memberikan pelayanan melalui briefing.
2. Sudah dilakukan pengarahan dan pembinaan agar setiap petugas PTSP tidak melakukan penyalahgunaan jabatan untuk imbalan tertentu :
 - Petugas pelayanan tidak terpengaruh dengan bujukan beberapa pengguna layanan dan tetap patuh pada prosedur pelayanan.
3. Sudah dilakukan pengarahan dan pembinaan agar setiap petugas PTSP harus menghindari pencaloan pegawai Pengadilan dalam membantu pengurusan layanan :
 - Meningkatkan pelayanan dengan menerapkan prioritas pelayanan
 - Pelatihan, briefing, rapat, supervise internal bagi petugas layanan untuk meningkatkan waktu pelayanan.

IV. Penutup

Demikian Monitoring dan Evaluasi terhadap 3 Hasil Terendah Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi periode bulan Oktober 2025 sampai Desember 2025.

Mengetahui:

Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao



Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Ba'a, 6 Januari 2026

Panitera



Alfonsus Hoinbala, S.H.